

# ekonomisme dan globalisasi

*by* Ery Supriyadi

---

**Submission date:** 18-Jul-2020 10:51PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1359027643

**File name:** ekonomisme\_dan\_globalisasiaq.doc (95K)

**Word count:** 3173

**Character count:** 22424

## **1** Ekonomisme, Pengembangan Koperasi dan Globalisasi

Oleh : Ery Supriyadi R.

### **Abstrak**

**1** Berbekal sejarah pengalaman pengembangan ekonomi didapatkan pemahaman konsep yang mengartikan bahwa pembangunan sebagai upaya menuju kemajuan teknologi dan ekonomi, komersialisasi, industrialisasi, peningkatan standar hidup, pendidikan, dan perluasan keterlibatan masyarakat dalam partisipasi, di samping pemahaman pembangunan sebagai perbaikan publik dan kualitas hidup, sarana memperkuat pemerintah dalam proses industrialisasi, ataupun posisi pemerintah sebagai subyek pembangunan semata. Pengalaman negara maju menunjukkan bahwa sikap dan perilaku mengagungkan pembangunan materi dan hidup untuk menumpuk kekayaan berlandaskan sifat egoisme-individualistik-liberal guna mencapai kepuasannya mengalami ketidakamanan dan ketidaktenntraman kehidupan itu sendiri karena pada dasarnya manusia tidak hanya sebagai individu, dan bukan sekedar meraih kepuasan/kebebasan, tetapi menyangkut hidup bermasyarakat dan berkeadilan Sistem ekonomi kapitalis liberal "efisien", pada kenyataannya bias pada kepentingan para pemilik modal, pemodal lokal, pemodal asing, yang mengorbankan lapisan miskin. Ekonomisme merupakan paham yang mendewa-dewakan pertumbuhan ekonomi dan "economism" (ekonomisme) memorsatukan pembangunan materi dan tidak menganggap perlu dan penting pembangunan spiritual. Hal ini berakibatkan fatal bagi proses maupun pembangunan bahkan hampir menjadikan pembangunan sebagai agama baru. Sistem ekonomi pasar kapitalis menyuburkan hubungan pejabat pemerintah "bersekongkol" dengan dunia bisnis dan keduanya memperoleh keuntungan berupa persekongkolan. Sistem ekonomi yang lebih menonjolkan egoisme, kepentingan pribadi, membawa cronym economic menjadi subur dan diikuti ditinggalkannya asas kekeluargaan atau terkalahkannya kepentingan umum (publik) dan ekonomi rakyat. Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan sosial, perubahan struktur, perubahan kultur dan paradigma pembangunan pelaku ekonomi akan mempengaruhi kemampuan maupun kinerja koperasi dalam menghadapi globalisasi.

**Keywords :** ekonomisme, komersialisasi, kapitalis, dualistik, persekongkolan, koperasi, pembangunan

## **Pendahuluan**

Pembangunan bertujuan untuk memperbaiki, meningkatkan, memajukan, menciptakan suasana, situasi dan kondisi kepada arah yang lebih baik dan lebih berkembang bagi rakyat dan masyarakat, serta bangsa dan negara. Namun demikian, fenomena dunia dan peradaban manusia menunjukkan terjadinya dikotomi pembangunan dan hasil pembangunannya, yang dapat terlihat dari pola pendekatan dan kinerja kemakmuran antar negara dalam bentuk adanya negara maju, negara berkembang, dan negara sedang berkembang/negara terbelakang, atau bahkan negara miskin. Todaro (1979) menyatakan bahwa beberapa karakteristik negara berkembang/terbelakang adalah sebagai berikut :

- Ketidaklayakan tempat tinggal, perumahan
- Ketidacukupan pangan,
- Kesehatan yang buruk, epidemi-endemi penyakit, sanitasi buruk, air bersih terbatas.
- Rendahnya pendidikan
- Rendahnya melek huruf
- Tidak punya pekerjaan, tingkat pengangguran tinggi
- Rendahnya jaminan hari tua,
- Kesempatan untuk hidup tidak menentu
- Rendahnya penyediaan-ketersediaan infrastruktur (listrik, telekomunikasi, transportasi)
- Aspirasi kurang diakomodasi
- Kesenjangan sosial
- Kesenjangan ekonomi
- Kesenjangan politik
- Kesenjangan yang semakin menganga

Sejak karakteristik yang disusun oleh Todaro (1978), sampai saat ini pun negara yang termasuk dalam kategori sedang berkembang, ternyata relative cukup banyak yang masih tetap berada dalam keadaan sedang berkembang dan terbelakang. Walau tentunya dengan beberapa variabel yang mulai menunjukkan

perbaikan. Muncul pertanyaan, mengapa ini masih terjadi dan sampai kapan negara dalam kelompok ini tetap sedang berkembang atau akankah terus terbelakang ? Apakah negara tersebut diterbelakangkan atau disengaja tetap pada posisi sedang berkembang dan terbelakang atau memang negara tersebut sendiri tidak sanggup mengembangkan dirinya menjadi negara lebih berkembang atau maju ? Tentunya setiap negara ingin semakin berkembang dan maju, namun mungkinkah faktor perjalanan pembangunannya yang membuat lamban berkembang atau tidak berkembang sementara negara lain maju dan berkembang ? Mungkin pula negara tersebut berkembang, tetapi dengan kecepatan dan percepatan pembangunan yang sangat lamban; sementara negara lainnya berkembang pesat dengan kecepatan dan percepatan pembangunan yang sangat tinggi. Jika diasumsikan dua pernyataan terakhir yang relatif mendekati kebenaran, apakah ini merupakan indikasi masih lemahnya rumusan pembangunan dan arah pembangunan serta pencapaiannya. Salah satunya penyebabnya adalah adanya konflik secara internal maupun eksternal di negara yang termasuk kategori sedang berkembang atau terbelakang. *A Country is poor because it is poor (Ragna Nurkse, 1950). A country is poor because of poor policies (Bates,1981)*

Kondisi actual dan factual mengenai pembangunan ekonomi di atas, lebih lanjut memunculkan pertanyaan mendasar, apakah paradigma ekonomisme memiliki kecenderungan untuk menempatkan Negara Sedang Berkembang (NSB) untuk tetap menerima kegiatan pembangunan ekonominya seperti keadaannya. Atau mungkin hablurisasi ekonomisme yang terjadi di NSB tidak mencapai titik temu yang membentuk perfomansi dan format pembangunannya, sehingga keadaan Negara sedang berkembang itu sendiri yang terjebak darai berbagai corak pembangunannya menjadi tanpa bentuk. Tulisan ini mencoba melakukan penelaahan terhadap beberapa pemahaman mengenai ekonomisme dan menguraikan kemungkinan yang menjadi hambatan pembangunan, pengembangan koperasi dalam mengkristalisasikan pembangunan ekonominya dan mrnghadapi globalisasi.

### **Ekonomisme dan Orientasi Pembangunan**

Pembangunan mencakup sisi penciptaan kesempatan berusaha, pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki, dan penerimaan yang menunjang kebutuhan pembangunan yang memberikan nilai dan manfaat positif serta berkelanjutan. Praktek-praktek eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dan tidak terencana, penjualan aset daerah, pembebanan pajak dan retribusi yang tidak rasional akan memicu para investor enggan untuk masuk ke dalam kegiatan ekonomi pada Negara sedang berkembang. Praktek ini terindikasi pula diikuti dengan sumberdaya alam yang semakin rusak, munculnya konflik sosial, konflik politik yang pada akhirnya merugikan berbagai kegiatan dan komunitas yang ada baik kota maupun wilayah.

Modernisasi/industrialisasi dilatarbelakangi oleh sejarah negara-negara barat dalam melakukan pembangunan negaranya yang diawali oleh revolusi industri dan perkembangan pemikiran dan peradaban masyarakat negara barat baik ideologi, kultur, sosial, ekonomi, politik dan sebagainya. Modernisasi didasarkan atas upaya manusia melakukan proses aktivitas ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih modern dengan menerapkan acuan kemakmuran manusia melalui keyakinan dan rasionalitas dari akumulasi modal dan industrialisasi.

Pemikiran dependensi yang dipelopori oleh Da Santos, seorang pemikir Amerika Latin yang dipengaruhi oleh pemikiran Neo Marxis merupakan kritik terhadap teori modernisasi. Pemikiran dependensi dilatarbelakangi oleh beberapa fenomena yang terjadi dalam proses dan implikasi pembangunan modernisasi, yaitu terjadinya *leakage* sumberdaya alam oleh negara maju terhadap negara berkembang atau sedang berkembang, neokolonialisme, adanya ketergantungan teknologi, tenaga ahli dari negara dunia ketiga kepada negara maju, terjadinya ketergantungan pasar input dan output dari negara dunia ketiga kepada negara maju yang menghasilkan ketidakmandirian suatu negara dalam proses pembangunannya.

Selanjutnya pemikiran sistem global dilatarbelakangi oleh fenomena adanya interaksi antar negara yang menunjukkan dan antar kutub-kutub pertumbuhan di dunia. Terjadi polarisasi negara-negara maju dan negara miskin menunjukkan

perbedaan yang sangat mencolok. Keadaan ini berimplikasi pada perkembangan pembangunan suatu negara. Bagi negara yang miskin, maka perkembangannya semakin tertinggal dibandingkan dengan negara maju. Kecepatan dan percepatan pembangunan di negara maju lebih tinggi dibandingkan dengan negara miskin atau sedang berkembang. Bagi negara yang berkembang yang memiliki kemampuan dan kapasitas lokal yang kuat dalam berinteraksi dengan negara maju akan mampu mengatasi terjadinya eksploitasi negara maju terhadap negaranya. Interaksi antar kutub dapat berdampak positif, namun dapat pula negatif terhadap pembangunan suatu negara, di antaranya membentuk struktur interaksi *center-semiperiphery* dan *periphery*. Bagi negara mempunyai kapasitas lokal dan aksesibilitas yang kuat terhadap negara maju akan menjadi *semiperiphery*, sedangkan bagi negara yang miskin akan semakin tertinggal dan menjadi *periphery* negara maju atau *periphery* dari negara *periphery*.

Teori alternatif merupakan pemikiran yang berupaya mencoba mengantisipasi terjadinya eksploitasi pembangunan negara maju terhadap negara miskin (sedang berkembang), mendudukkan manusia sebagai subyek dan obyek pembangunan, memformulasikan kebutuhan dasar manusia dalam pembangunan, fokus pada harkat martabat manusia sebagai aktor pembangunan, pemberdayaan ekonomi lokal, keterlibatan komunitas masyarakat dalam pembangunan dan prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Prinsip dasar teori alternatif ini dilatarbelakangi oleh beberapa kelemahan yang terjadi dari teori pembangunan modernisasi/industrialisasi, dependensi, dan sistem global. Beberapa kelemahan dari teori pembangunan sebelumnya tersebut adalah :

- a. Lebih menekankan pada aspek ekonomi, manusia sebagai objek pembangunan, dan manusia dianalisis secara tidak langsung. Pemikiran parsial ini tidak mampu menangkap semua aspek pembangunan, yang berakibat kepada pola pemikiran menyerderhanakan suatu pembangunan. Hal ini menimbulkan ketimpangan antara negara maju, negara berkembang, dan negara sedang berkembang.

- b. Ketimpangan pembangunan yang semakin tajam dan besar antara negara maju dan miskin mengakibatkan terjadi disparitas yang semakin menajam antar negara yang diikuti dengan polarisasi pengkutuban.
- c. Lingkungan hidup banyak diabaikan atau lebih banyak bersifat eksploitatif terhadap berbagai sumberdaya. Orientasi ukuran pembangunan didasarkan atas tingkat pendapatan dalam bentuk (GNP atau PDRB). Keadaan ini memiliki kelemahan mengingat bahwa tingkat pendapatan tidak dapat menutupi semua aktivitas suatu negara dan perhitungannya tidak dikoreksi dengan eksternalitas yang terjadi (eksternalitas tidak masuk dalam perhitungannya-lebih berorientasi *maximized profitability*).
- d. Posisi masyarakat dianggap tidak mempunyai inisiatif dalam pembangunan. Masyarakat sebagai komunitas manusia tidak terlibat langsung dalam pembangunan, pembangunan lebih banyak dikuasai dan diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah sebagai aktor penentu dan pengambil keputusan kebijakan pembangunan.

Sebagai proses pembelajaran, ilustrasi pengalaman pembangunan dan sistem ekonomi negara maju menjadi suatu pelajaran berharga dalam melakukan rekonstruksi sosial, sekaligus sebagai bahan pengetahuan yang dapat divalidasi dan terintegrasi dalam suatu bentuk tindakan. Ilustrasi historis diharapkan menjadi pelajaran yang sangat berarti dalam melihat pentingnya adanya saling keterkaitan dan ketergantungan antara masalah ekonomi dan politik dengan pengetahuan dan kekuasaan.

Pengalaman pengembangan ekonomi didapatkan pemahaman konsep pembangunan sebagai upaya menuju kemajuan teknologi dan ekonomi, komersialisasi, industrialisasi, peningkatan standar hidup, pendidikan, dan perluasan keterlibatan masyarakat dalam partisipasi. Pembangunan juga sebagai perbaikan publik dan kualitas hidup, sarana memperkuat pemerintah dalam proses industrialisasi, maupun menempatkan posisi ekonomi rakyat sebagai subyek pembangunan.

### ***Pengalaman Pembangunan Negara Maju***

Sikap dan perilaku mengagungkan pembangunan materi dan hidup untuk menumpuk kekayaan (*ekonomisme*) berlandaskan sifat egoisme-individualistik-liberal guna mencapai kepuasannya menimbulkan ketidakamanan, ketidaknyamanan, dan ketidaktenraman kehidupan itu sendiri. Pada dasarnya manusia tidak hanya berposisi sebagai individu, dan bukan sekedar meraih kepuasan/kebebasan, tetapi menyangkut hidup bermasyarakat dan berkeadilan.

Pembangunan ekonomi yang berorientasi tunggal pada pertumbuhan ekonomi seringkali meninggalkan pemerataan dan keadilan. Sistem ekonomi kapitalis liberal "efisien", pada kenyataannya sangat bias pada kepentingan para pemilik modal, pemodal lokal, pemodal asing, yang mengorbankan lapisan miskin. Ekonomisme merupakan faham yang mendewa-dewakan pertumbuhan ekonomi dan "*economism*" (*ekonomisme*) memomorsatukan pembangunan materil dan tidak menganggap perlu dan penting pembangunan spiritual. Hal ini berakibatkan fatal, bahkan hampir menjadikan pembangunan sebagai agama baru. (Richard Tarnas, 1994 dan Faqih, 1996). Secara deskripsi pengalaman ekonomi di negara maju disajikan pada tabel 1.

Adam Smith (1759 dalam Mubyarto, 2001) mengingatkan bahwa sifat-sifat manusia selalu bersimpat satu sama lain dan menciptakan kehidupan masyarakat yang tentram, walaupun pada pandangan *welfare state* (Adam Smith, 1776) menyatakan bahwa manusia adalah "*Homo-economicus*" dimana sumber sifat-sifat manusia adalah egois dan selalu mementingkan diri sendiri.

<sup>1</sup> *"As society cannot subsist unless the laws of justice are tolerably observed, as no social intercourse can take place among men who do not generally abstain from injuring one another..."*

*"Man it has been said, has a natural love for society, and desires that the union of mankind should be preserved for its own sake, and though he himself was to derive no benefit from it."*

### ***Pengalaman Pembangunan Indonesia***

Kekuasaan monopolistik perkumpulan pedagang Belanda (VOC, 1600-1800), di bawah monopoli pemerintah (Tanam Paksa, 1830-1870), kekuatan



kapitalis-kapitalis besar swasta mulai 1870. Kesamaan akibatnya sangat jelas yaitu makin memiskinkan rakyat. Politik "balas budi" yang disebut politik etik, pembangunan irigasi, perbaikan edukasi, emigrasi, pemindahan penduduk miskin dari Jawa ke Luar Jawa. Politik Etik tidak berhasil, karena biayanya harus dibayar dari pajak perusahaan-perusahaan besar yang pada dasarnya tidak ingin merugi. Fasilitas-fasilitas irigasi dimanfaatkan oleh perkebunan-perkebunan, edukasi untuk meningkatkan kemampuan pekerja, kolonisasi "disaingi" pengiriman kuli kontrak dari Jawa untuk memenuhi kebutuhan buruh-buruh perkebunan di Luar Jawa. Hal ini berkaitan dengan pemerintah penjajah yang cenderung memihak pada kepentingan para pemodal pembayar pajak yang sangat penting bagi penerimaan pemerintahan penjajah.

Pembukaan perusahaan-perusahaan besar bidang perkebunan dan kehutanan menimbulkan masalah "etika bisnis" yang bertabrakan dengan kepentingan petani/pekebun/penduduk sekitar hutan yang secara turun temurun memperoleh mata pencahariannya di situ. Pada zaman penjajahan para pemodal "mengantongi" izin usaha dari pusat (Jakarta), yang mengasumsikan bahwa hutan "tidak ada manusianya". Asumsi yang demikian adalah sangat keliru bahkan pemerintah daerah "dilewati" atau tidak dalam posisi membantu. Masalahnya semakin kompleks berkembang manakala kontrak-kerja HPH dimiliki pejabat-pejabat tinggi, "keluarga cendana". Teori Dualistik Boeke yang dinyatakan tahun 1910 meragukan diterapkannya teori ekonomi neoklasik barat khususnya perilaku ekonomi rakyat Indonesia. Asumsi masyarakat barat tidaklah selalu sama dengan masyarakat timur. Pandangan Boeke ini dilengkapi oleh Ormerod ,2000 (*Butterfly Economics*).

Allen dan Thomas (2000) dalam Mubyarto (2001) juga menyatakan bahwa selama 32 tahun Orde Baru berprinsip melaksanakan deregulasi tetapi secara terselubung menerapkan sistem kapitalis monopoli yang bersifat perkoncoan. Pemerintah Orde Baru telah berhasil membangun ekonomi bangsa Indonesia, sekaligus menjadi bangsa salah satu negara yang paling korup di dunia. Sistem ekonomi pasar kapitalis, pejabat pemerintah "bersekongkol" dengan dunia bisnis dan keduanya memperoleh keuntungan berupa persekongkolan. Sistem ekonomi yang lebih

menonjolkan egoisme pengajaran kepentingan pribadi, membawa korupsi menjadi subur dan diikuti ditinggalkannya asas kekeluargaan atau kebenaran dengan terkalihkannya kepentingan umum (publik).

*\* Monopoly Capitalism is a stage in the development of capitalism dominated by giant corporations each of which controls a relatively high proportion of the local or world markets for its products \* (Allen dan Thomas (2000))*

Pemberantasan korupsi hanya dapat dilakukan melalui reformasi budaya secara total, mengingat bahwa pendekatan pembangunan ekonomi dengan sistem ekonomi pasar mendudukkan pemerintah "disandera" oleh para pengusaha besar eks konglomerat. Kecemburuan sosial berubah menjadi keresahan, dan keresahan sosial berubah menjadi kerusuhan sosial.

Ekonomi rakyat tergusur oleh penerapan sistem ekonomi kapitalis liberal (perkoncoan) atau sistem kapitalis monopoli (monopoli kapitalis), karena negara bersekongkol dengan para pengusaha konglomerat untuk mengeruk keuntungan besar dengan merugikan kepentingan umum. Krisis ekonomi timbul, namun ternyata sektor ekonomi rakyatlah yang terbukti telah "menyelamatkan" ekonomi, yang menampung tenaga kerja sangat besar sudah kembali normal. Ekonomi Indonesia masih bersifat dualistik, dengan sektor ekonomi rakyat yang relatif kuat dan tidak tergantung, tetapi kurang mendapatkan perhatian (*poor policies*).

Pada sisi pandangan lain, diperoleh pelajaran bahwa kemajuan suatu negara tidak hanya sebagai pengaruh sistem ekonomi saja, namun juga tatanan nilai, perubahan sosial, perubahan struktur, perubahan kultur dan paradigma-paradigma yang terjadi. Keadaan-keadaan ini dipengaruhi pula oleh paradigma perencanaan pembangunan dan arah pembangunan suatu negara baik secara internal maupun eksternal. Pemikiran klasik, neo-klasik, modern, postmodern, positivisme, postpositivisme akan pula menentukan *logical construct* pembangunan baik sebagai input, proses maupun hasilnya. Selanjutnya jika dilihat dari paradigma pembangunan yang melatarbelakangi para pemikir dan pelaku pembangunan ekonomi dalam bentuk

*positivisme, interpretivisme dan sosial kritik* juga akan mempengaruhi proses dan hasil pembangunan yang akan menentukan kemajuan suatu negara.

**Tabel 1. Pengalaman Ekonomi Negara Maju**

<b>Sebelum tahun 1950-an sampai 1960-an</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>† Individu-individu dalam komunitas sanggup berdiri sendiri. Komunitas koperasi terorganisasikan dengan baik dari para produsen, konsumen, dan perkeditan</li> <li>† Koperasi-koperasi berkonsolidasi kedalam arena bisnis yang besar yang mana diadministrasikan dengan keterlibatan komunitas kecil dalam pengambilan keputusan Koperasi berhadapan dengan pilihan untuk tumbuh berkembang atau stabil dalam menghadapi kompetisi dengan monopoli kapitalis.</li> <li>† Para pencetus kebijakan berasumsi bahwa migrasi keluar merupakan tanggungjawab individu yang menarunkan ekonomi lokal, untuk itu perlu membuat teknologi baru dan melakukan terobosan investor dari luar.</li> </ul>
<b>Memasuki tahun 1960-an</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>† Terjadi perubahan paradigma ideologi <i>welfare state</i> yang mengubah cara berpikir rakyat tentang hubungan komunitas dan negara. Ideologi <i>welfare state</i> diharapkan dapat dan akan mendukung rakyat untuk tetap bertahan dalam komunitasnya, walau basis ekonominya kolaps sekalipun. Individu-individu dalam komunitas terbiasa dan lebih menyukai manfaat stabilitas dari pemberian jaminan pemerintah ketika sektor privat gagal.</li> <li>† Pemerintah mendukung asuransi pengangguran secara nasional, membuat proyek-proyek, subsidi pertanian, relief korporasi, guna mendesain dan menstimulasi pusat pertumbuhan regional. <i>Top down development approach</i>.</li> <li>† <i>Top down development approach</i> menciptakan stabilitas, tetapi harus dibayar mahal dengan pemborosan dari kelembagaan manajemen komunitas itu sendiri. Dengan <i>welfare state</i>, komunitas hanya menjadi suatu tempat dengan hak-hak bertahan hidup tidak lebih hanya sebatas lokasi produksi, sedangkan potensinya sebagai agen perencanaan turun.</li> </ul>
<b>Pertengahan 1970-an dan 1980-an</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>† <i>Welfare state</i> mulai menderita krisis fiskal yang berlarut-lurut dan dahsyat. Pada awal tahun 1980-an <i>welfare state</i> berada dalam keadaan finansial yang sangat memprihatikan, komunitas dalam kondisi depresi yang kronis secara regional, kolapsnya pasar komoditas, dan kompetisi internasional dalam manufaktur. Dukungan terhadap <i>welfare-state</i> mulai retak; bantuan komunitas dan individu terbatas. Tidak ada lagi harapan dari pemberian jaminan pemerintah ketika sektor swasta gagal. Kejadian ini terus meningkat, yang akhirnya mengalami dampak sosial berupa biaya ekonomi ketergantungan.</li> </ul>
<b>Tahun 1980-an 1990-an</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>† Menyadari adanya hambatan yang semakin meningkat baik secara lokal maupun nasional oleh deplesi dan degradasi sumberdaya alam, keputusan penanganan inovasi telekomunikasi yang terlampau jauh, dan Bergeraknya modal begitu cepatnya, diikuti perdagangan yang kurang terkelola, maka keadaan ini berujung menyebabkan krisis fiskal.</li> <li>† Berbagai pilihan dicoba dilakukan dan pendekatan perencanaan pertumbuhan didiskusikan untuk mengembangkan cara-cara agar produknya laku di pasar, tetapi seringkali malah menciptakan vulnerabilitas baru bagi dirinya yang menjadi semakin bergantung pada export, tenaga kerja, atau substitusi impor. Beberapa pendekatan komunitas memfokuskan diri pada upaya mencari jalan memperbaiki <i>stabilitas dan sustainabilitas</i> dalam jangka pendek maupun panjang dengan mengurangi ketergantungan.</li> </ul>

Dalam praktek pembangunan di dunia ketiga, kecenderungan liberalisasi ekonomi di perdesaan dan sektor pertanian, dilakukan lewat pencabutan subsidi dan masuknya

sarana produksi dari luar yang diikuti dengan keterbatasan sediaan infrastruktur dasar (jalan, air, tenaga listrik, dll), produksi yang minim, degradasi lingkungan merupakan realitas yang menjadikan kawasan perdesaan dan pertanian menjadi termarginalkan. Dengan alih-alih efisiensi dan perdagangan bebas, maka pelaku pertanian di perdesaan harus sanggup menghasilkan produksi pertaniannya tanpa adanya bantuan subsidi pupuk atau sarana produksi lainnya yang sangat berpengaruh terhadap proses dan hasil produksi yang dihasilkan. Para pelaku pertanian dan perdesaan diminta kerelaannya untuk menerima harga sarana produksi yang mahal dan bersifat tetap, namun harga komoditas yang dihasilkan relatif fluktuatif dibiarkan mengikuti mekanisme pasar.

Talenta kemandirian berproduksi dan berkompetisi dihembuskan sebagai tatanan nilai yang harus dipatuhi oleh para pelaku pertanian dan perdesaan, tanpa ditanya terlebih dahulu kepada para petani-penduduk perdesaan apakah setuju atau tidak, sepakat atau tidak sepakat terhadap keadaan ini. Dalam situasi seperti ini, Indonesia saat ini berada pada wacana era tahun 60-an, yang kondisinya mirip yaitu perencanaan pembangunan dijadikan *alat kaki tangan elit dan aktor kunci bisnis yang memaksakan kehendaknya, memanipulasi publik, dan mengendalikan sumber daya atas nama kesejahteraan*. Perspektif perencanaan pembangunan yang menempatkan koperasi sebagai alat kaki tangan elit dan aktor bisnis ini akan menimbulkan pemikiran dan tindakan progresif, kritik dan radikal sebagai upaya menyeimbangkannya. Mungkin ada benarnya preposisi yang menyatakan bahwa perkembangan atau maju mundurnya berkait erat dengan politik pembangunan pertanian dan keberpihakan kebijakan pada koperasi sebagai lembaga ekonomi kerakyatan. Keberadaan dan fungsi koperasi sebagai badan usaha yang diharapkan mampu menjembatani peningkatan kesejahteraan petani dan kawasan perdesaan, walau tidak dapat dipungkiri bahwa lembaga koperasi sebagai organisasi dan badan usaha relatif dalam kondisi kinerja koperasi tertekan saat ini dan relatif tertinggal dibanding lembaga usaha swasta dan BUMN.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dubashi, P. R., (1970). Principles and Philosophy of Co-operation. Vaikunth Mehta National Institute of Co-operative Management. New Delhi. India.
- Etzioni, Amitai. 1965. *Mixed scanning : A Third Approach to Decision-Making*?. The Public Administration Review. December 1965.
- Hansen, Frank and Chris Jensen-Butler. 1995. Economic Crisis and the Regional and Local Economic Effects of Welfare State : The Case of Denmark. *Regional Studies*, Vol 30.2, pp 167-187. 1995.
- Herman Soewardi. 1995. *Filsafat Koperasi atau Cooperativism*. UPT Penerbitan Ikopin.
- Klosterman, Richard E. 1996. *Arguments for and Against Planning*. In Campbell, Scott and Fainstein, Susan S.(Ed.) 1996. *Reading in Planning Theory*. Blackwell Publisher. Oxford. UK.
- Mandelbaum, Seymour J, and Mazza, Luigi, and Burchell, Robert W., 1996. *Explorations in Planning Theory*. Center For Urban Policy Research, Rutgers, The State University of New Jersey. New Brunswick, New Jersey.
- Mubyarto, 2000. *Membangun Sistem Ekonomi*. BPFE. Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. 2000. *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dan Peranan Ilmu-ilmu Sosial*. Yayasan Agro-Ekonomika. Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. 2001. *Amandemen Konstitusi dan Pergulatan Pakar Ekonomi*. Andi Media. Yogyakarta
- Ormerod, Paul. 2000. *Butterfly Economics. A New General Theory of Social and Economic Behaviour*. Patheon Books, New York.
- Rogerson, Christian M. 1994. *Democracy, Reconstruction, and Changing Local and Regional Economic Planning in South Africa*. In *Globalization, Democratization, Decentralization, and Sustainable Development*. *Regional Development Dialogue(RDD)* Vol. 15, No. 1 , Summer 1994.
- Sanyal, Bish. 2002. *Globalization, Ethical, Compromise and Planning Theory. Planning Theory Essay*. Sage Publications (London, Thousand Oaks, CA and new delhi) Vol. (2) 116-123 2002.
- Todaro, M. 1979. *Economics for A Developing World : Introduction to a Principle, Problem, and Policies*. Hongkong : Longman.

# ekonomisme dan globalisasi

---

## ORIGINALITY REPORT

---

17%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

---

## PRIMARY SOURCES

---

1

[e-journal.ikopin.ac.id](http://e-journal.ikopin.ac.id)

Internet Source

10%

2

[media.neliti.com](http://media.neliti.com)

Internet Source

4%

3

[journals.itb.ac.id](http://journals.itb.ac.id)

Internet Source

2%

---

Exclude quotes Off

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography Off